

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2015**

**Nanda Yoga Aditiya**

**Novi Dirgantari**

Email: Aditayananda5@gmail.com

Program Studi Akuntansi SI Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

**ABSTRACT**

The reseach aimed to give emprical evidence of the effect of Own Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Specific Allocation Fund (DAK) and Financing Surplus (SiLPA) on Capital Expenditure. The sample of this research was the budget uptake of Regional Government Budget (APBD) of Regencies and Cities in Central Java Province that have been audited by Supreme Audit Agency (BPK) during 2013-2015. The data of this research were collected using census method. Meanwhile, the data analysis techniques used in this research were descriptive statistic test, classical assumption test, multiple regression analysis, and hypotesis testing with significance degree ( $\alpha$ ) 0,05. The result of this research showed that Own Source Revenue (PAD) and Specific Allocation Fund (DAK) had significant and positive effect on Capital Expenditure. Meanwhile, General Allocation Fund (DAU) and Financing Surplus (SiLPA) did not have positive and significant effect on Capital Expenditure.

Key word : Own Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Specific Allocation Fund (DAK), Financing Surplus (SiLPA) and Capital expenditure

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal. Sampel dalam penelitian ini realisasi APBD Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tahun 2013-2015. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sensus, sementara teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) 0,05. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Belanja Modal.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menyebutkan

“Pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia”.

Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001. Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini menegaskan bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk

menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum di dalam anggaran daerah.

Sehingga pembangunan senantiasa harus mengacu pada perencanaan yang dijabarkan dalam pola dasar pembangunan, arah kebijakan umum dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Sujarweni, 2015) Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik (Rumiyati, 2013).

Pada masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) masing-masing. Dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastuktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Wandira, 2012).

Untuk mengurangi adanya kesenjangan antar daerah dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, lahirilah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 159 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana tersebut bersumber dari APBN, yang digunakan untuk pendanaan kebutuhan rumah tangga daerahnya untuk pelaksanaan desentralisasi.

Sumber pendanaan lainya yang digunakan untuk pengalokasian Belanja Modal untuk penyediaan berbagai fasilitas publik adalah Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SiLPA). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

digunakan untuk belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jumlah belanja langsung dapat berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset dan sebagainya yang didalamnya juga terdapat belanja tidak langsung lebih kecil dari belanja langsung. (Ardhini, 2011 dalam Mentayani & Rusmanto, 2013).

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi khusus (DAK), sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berpengaruh Positif signifikan terhadap belanja modal?

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam pasal 6 Undang–Undang Nomor 33 tahun 2004, Sumber PAD terdiri dari:

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, pemotongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah

Dalam Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Berdasarkan Undang-Undang No 33 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri PDN *netto* yang ditetapkan dalam APBN, (Yovinta, 2011). Prosentase penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) 90% untuk pemerintah Kabupaten atau Kota dan 10% untuk pemerintah provinsi.

Dana alokasi Umum (DAU) terdiri dari :

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah provinsi
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten atau Kota

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib menyediakan Dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pendamping bersumber dari APBD, daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping.

### **Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah satu periode. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut PP No. 58 tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang ideal

perlu ditentukan sebagai salah satu dasar dalam evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

### **Belanja Modal**

Berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2005 menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan menurut standar akuntansi pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

### **Hipotesis**

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal

H3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal

H4: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh Positif signifikan terhadap belanja modal

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2015. Sampel penelitian ini adalah Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 29 Kabupaten dan 6 Kota. Pengambilan sampel menggunakan metode sensus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui seberapa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap belanja dapat dilihat sebagai berikut:

Variabel	B	Sig.t
Konstanta	-28003947371,201	
PAD	0,445	0,000
DAU	0,071	0,051
DAK	1,295	0,000
SiLPA	0,096	0,134

Berdasarkan tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -28003947371,201 + 0,445 \text{ PAD} + 0,071 \text{ DAU} + 1,295 \text{ DAK} + 0,096 \text{ SiLPA} + e$$

## PEMBAHASAN

### Pengujian Hipotesis 1

Hasil analisis Uji t menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai koefisien dengan arah positif sebesar 0,445 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 7,214 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,66039, Sig 0,000 ( $< 0,05$ ). Nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , berarti dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, menunjukkan arah koefisien positif sejalan dengan yang dihipotesiskan dan nilai signifikan kurang dari 0,05 dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal **diterima**.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh maka mencerminkan kinerja pemerintah

daerah yang baik, sehingga dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh maka semakin tinggi juga yang dialokasikan untuk belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suprayitno (2015), Sugiardi & Supadmi (2014), Mawarni dkk (2013), Palealu (2013) Martini & Dwianandra (2015), Kusnandar & Siswanto (2011), Tausikal (2008) dan Yawa & Runtu (2015) dengan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Adapun penelitian yang tidak sejalan yaitu penelitian Mentayani & Rusmanto (2013), hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Wandira (2013) hasilnya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal.

## **Pengujian Hipotesis 2**

Hasil analisis Uji t dari tabel 4.12 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai koefisien dengan arah positif sebesar 0,071 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,976 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,66039, sig 0,051 ( $> 0,05$ ). Nilai signifikansi sebesar  $0,051 > 0,05$  berarti dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, karena nilai signifikan yang lebih dari 0,05 dan nilai koefisien menunjukkan arah positif. Berlawanan arah dengan yang dihipotesiskan dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal **ditolak\***.

Hasil analisis Uji t dari tabel 4.12 dilihat dari signifikan 0,10, karena dalam teori penelitian sosial yang mempunyai dampak ketidak pastian tinggi, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai koefisien dengan arah positif sebesar 0,071 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,976 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,66039, sig 0,051 ( $< 0,10$ ). Nilai signifikansi sebesar  $0,051 < 0,10$  berarti dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$

diterima yang artinya variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, karena nilai signifikan yang kurang dari 0,10 dan nilai koefisien menunjukkan arah positif. Sejalan dengan yang dihipotesiskan dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal diterima\*\*.

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam prakteknya dimanfaatkan untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan. Sedangkan fungsi adanya Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Siswantoro (2011) dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, Purnama (2014) hasil penelitian Dana Alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Keswondo dkk (2016) dan Apriyanto (2016) hasil penelitian Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

### **Pengujian Hipotesis 3**

Hasil analisis Uji t dari tabel 4.12 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai koefisien dengan arah positif sebesar 1,295 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,499 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,66039, sig 0,000 ( $< 0,05$ ). Nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  berarti dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, menunjukkan arah koefisien positif sejalan dengan yang dihipotesiskan dan nilai

signifikan kurang dari 0,05 dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal **diterima**.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Sehingga dalam hal ini jika Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak digunakan untuk kegiatan khusus dan prioritas nasional maka Dana Alokasi Khusus dapat digunakan untuk Belanja modal, semakin besar Dana Alokasi Khusus (DAK) semakin besar juga yang digunakan untuk belanja modal.

Hasil penelitian konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Palealu (2013), Wandira (2013), Apriyanto (2016) dan Tausikal (2008) dimana Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Adapun hasil penelitian yang tidak sejalan yaitu penelitian Meianto dkk (2014) hasil Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

#### **Pengujian Hipotesis 4**

Hasil analisis Uji t dari tabel 4.12 menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) memiliki nilai koefisien dengan arah positif sebesar 0,096 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,513 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,6603, sig 0,134 ( $> 0,134$ ). Nilai signifikansi sebesar 0,134  $> 0,05$ , berarti dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, karena nilai signifikan yang lebih dari 0,05 dan nilai koefisien menunjukkan arah positif, berlawanan arah dengan yang dihipotesiskan dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal **ditolak**.

Berdasarkan hasil analisis, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan praktek yang dilakukan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, untuk membelanjakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam bentuk belanja pengeluaran pembelian atau pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Sejalan dengan hasil penelitian Purnama (2014) hasil penelitian Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian yang tidak sejalan dengan hasil penelitian Rusmanto (2013), Kusnandar & Siswantoro (2011) hasil penelitian SiLPA secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal.

### **KESIMPULAN**

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan Pemerintah Kabupaten atau Kota di Seluruh Indonesia atau Seluruh pemerintah Provinsi di Indonesia, karena dapat melihat pengaruh seluruh Pemerintah Daerah se Indonesia tidak hanya dalam cangkupan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode waktu lebih dari 3 tahun atau time series. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap belanja modal seperti variabel luas wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Kusnandar & Siswantoro (2011) hasil penelitian luas wilayah secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal. Meianto dkk (2014) hasil penelitian luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian Putu dkk (2014) hasilnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. 2004. *Undang Undang No.32 Tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Anonim. 2004. *Undang Undang No.33 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Anonim. 2005 . *Peraturan Pemerintah No. 55 Tentang Dana Perimbangan*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Apriyanto, Jati Dwi. 2016. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal kabupaten/kota di provinsi Jawa tengah periode 2013-2014*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: *Skripsi*.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Tersedia dalam [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). [Accessed 11 September 2016]
- Dihastuti. 2014. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal (Studi empiris pemerintah Kabupaten se Provinsi Riau)*. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Frelistiyani, Winda. 2010. *Pengaruh Dana alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa pada Tahun 2006-2008)*. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS.cetakan ke IV*. Badan penerbit UNDIP. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2009. *Analisis Multivariate lanjutan dengan program SPSS*. Badan penerbit UNDIP. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi.Edisi ke 7*. Badan penerbit UNDIP. Semarang.
- Indriantoro, Nur., dan B. Supomo 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi pertama. BPFE-Yogyakarta.
- Keswando, Robin, Suharno, Djoko Kristianto 2016. *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan luas wilayah daerah terhadap alokasi belanja modal*

*studi empiris di provinsi jawa timur.* Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

- Mangowal, Jessy Chritine. 2013. *Pendapatan Daerah Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.* Jurnal EMBA. Vol. 1 No.4 Desember 2013, Hal 1386-1396. ISSN 2303-1174.
- Martini, Ni Luh Dina Selvia, dkk. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap belanja Modal Pada Kab. Buleleng Tahun 2006-2012.* E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2 Tahun 2014.
- Martini, Kadek dan A.A.N.B. Dwirandra.2015.*Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.2(2015):426-443. ISSN 2302-8586
- Mawani, Darwanis, dan Syukriy Abdullah. 2013.*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah (studi Kabupaten dan Kota di Aceh).*Jurnal Akuntansi Pasca Sarjanan Universitas Syiah Kuala PP 80-90. Vol. 2 No.2 Mei 2013. ISSN 2302-0164.
- Mayangsari, luh Putu Rani, dkk. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada pemerintah Kab.Buleleng.* e-Journal S1 akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2 No.1 Tahun 2014.
- Meianto, Edy, Betri, Cherrya Dhia Wenny. 2013. *Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dan luas wilayah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera selatan.* STIE Multi Data Palembang.
- Mentayani, Ida dan Rusmanto. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di pulau Kalimantan.* Jurnal Infestasi Vol. 9 No. 2 Desember 2013, Hal 91-102.
- Nugroho, Rudi Merdeka. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2011-2013.* Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Pelealu, Andreas Marzel. 2013. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2012-2013*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4 Desember 2013. Hal.1189-1197. ISSN 2303-1174.
- Purnama, Arif. 2014. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Periode 2012-2013*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rumiyanti, Ita. 2013. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal (Studi empiris di wilayah Karisidenan Surakarta)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rachmawati, Ayu Sintha. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2011-2012)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Setiyani, Rita Devi. 2015. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Studi Empiris Pada Kabupaten di Karesidenan Pati periode 2009-2013*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Siswantoro, Dodik. 2014. *Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal*. Universitas Indonesia.
- Sugiardi, Ni Putu dwi Eka Rini dan Ni Luh Supadmi. 2014. *Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 477-495, ISSN:2302-8556
- Suhendra, Made Dwi Septiadi, dkk. 2015. *Pengaruh dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (Dak), dan Belanja Pemeliharaan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Bali periode 2009-2013*. E Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 3 No.1 Tahun 2015.
- Suprayitno, Bambang. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Propinsi di Pulau Jawa*. Jurnal Riset

akuntansi dan Perpajakan JRAP. Vol. 2 No.1 Juni 2015, Hal 106-112.ISSN 2339-1545.

Syakier, Husin. 2012. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana alokasi Khusus terhadap Belanja Modal*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wandira, Arbie Gugus.2013.*Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. ISSN 2252-6765.

Yawa, Herman dan Treesje Runtu. 2015. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal di Kota Manado*. Jurnal berkala ilmiah efishensi. Volume 15 No. 04 tahun2015.

Yovita, Farah Marta. 2011. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (studi empiris pada pemerintah Provinsi se Indonesia periode 2008-2010)*. Skripsi. Universitas Diponegoro.